

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI
KANTOR BAPPEDA KAB. SIDENRENG RAPPANG
(Manajemen Syariah)**



Oleh
WIDYA DHARMA WUARLELA
NIM 15.2400.001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI
KANTOR BAPPEDA KAB. SIDENRENG RAPPANG
(Manajemen Syariah)**



Oleh
WIDYA DHARMA WUARLELA
NIM 15.2400.001

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI
KANTOR BAPPEDA KAB. SIDENRENG RAPPANG
(Manajemen Syariah)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh
WIDYA DHARMA WUARLELA
NIM 15.2400.001**

Kepada

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widya Dharma Wualela
Judul Skripsi : Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah di Kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2400.001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.273/In.39/PP.00.09/01/2019
Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Agy
NIP: 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH DI KANTOR BAPPEDA KAB. SIDENREN RAPPANG
(Manajemen Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

WIDYA DHARMA WUARLELA
NIM 15.2400.001

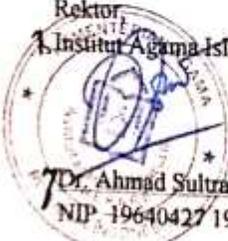
telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 10 Februari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

Rektor
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP 19640427 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah di Kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Widya Dharma Wuarlela

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2400.001

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.273/In.39/PP.00.09/01/2019

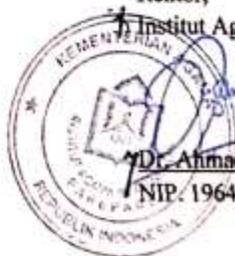
Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, pertolongan dan lindungan-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan salawat juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “Analisis Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang” yang pada dasarnya disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis sadar akan banyaknya kekurangannya, baik dari segi tata cara penulisan maupun dari segi pembahasan objek kajian dalam skripsi ini, namun penulis berusaha menghadirkan yang terbaik dan maksimal dari keterbatasan itu. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan sumbangan masukan dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak menerima banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Yesaya Wuarlela dan Rosmawati atas segala bimbingan, doa, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup terbalaskan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Damirah, S.E., M.M. Selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan

fikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:

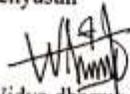
1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Rusnaena, M.Ag, selaku penanggung jawab Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si, selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan penelitian.

7. Bapak Sekretaris dan Seluruh Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubid serta Staf BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah membantu memberikan data yang diperlukan.
8. Secara Khusus kepada Kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Terima kasih atas dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
9. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada Ridha Widyanti, Mujahida Hardin, Helpiani, Mirnawati, dan semua sahabat-sahabat.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan dengan lapang dada mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga doa dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah, Amin.

Parepare, 10 Januari 2020
Penyusun


Widya dharmawati
15.2400.001

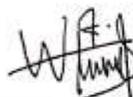
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Widya Dharma Wuarlela
NIM : 15.2400.001
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 Agustus 1997
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Di Kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2020
Penyusun



Widya Dharma Wuarlela
NIM. 15.2400.001

ABSTRAK

Widya Dharma Wuarlela “*Analisis Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah)* (dibimbing oleh Bapak. Zainal said dan Ibu Damirah).

Penelitian ini membahas tentang Penyusunan perencanaan anggaran pemerintah Daerah di kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen yang digunakan dalam penyusunan APBD pada kantor Bappeda kab. Sidenreng Rappang dan Untuk mengetahui kesesuaian Manajemen Syariah dalam Proses Penyusunan Perencanaan Anggaran. Dengan diterapkan adanya peraturan-peraturan tersebut pemerintah diharapkan dapat menunjukkan kualitas yang baik dan hal ini merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi yaitu mengamati objek-objek yang diteliti, dan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperjelas data yang dipandang masih kurang jelas dan melakukan wawancara kepada 6 orang pegawai Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dalam penyusunan perencanaan anggaran pemerintah daerah di kantor Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan dengan menggunakan fungsi Perencanaan (pengarah, minimalisasi ketidak pastian, minimalisasi pemborosan dan pengawasan) sehubungan dengan ini proses penyusunan perencanaan anggaran sudah sesuai dengan Manajemen yang ada. Dan penyusunan perencanaan anggarannya pun sudah tepat waktu dan memenuhi aturan yang di tentukan dari pemerinrah Pusat. 2). Setelah melalui proses analisis maka diperoleh hasil bahwa penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Darah di kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang telah sesuai dengan Manajemen Syariah.

Kata Kunci : Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	12
2.2.1 Proses	12

2.2.2 Perencanaan	13
2.2.3 Penyusunan.....	16
2.2.4 Pemerintah Daerah	16
2.2.5 Anggaran Pemerintah.....	29
2.2.6 Manajemen Syariah.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual	22
2.4 Kerangka Pikir.....	27
2.5 Bagan Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Manajemen yang digunakan dalam melakukan penyusunan APBD di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang	34
4.2 Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Sidenreng Rappang sesuai dengan Manajemen Syariah	65
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	
Tabel 4.2	Rencana Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang	
Tabel 4.3	Program/Kegiatan Bappeda Tahun 2018	
Tabel 4.4	Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
Tabel 4.5	Pencapaian antara capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir	
Tabel 4.6	Tujuan dan Sasaran Renja 2018	
Tabel 4.7	Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2018	
Tabel 4.8	Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2018	
Tabel 4.9	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Tabel 4.10	IKU Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018	
Tabel 4.11	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	28
2	Skema Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar
Lampiran 1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Surat Penelitian dari Bappeda
Lampiran 4	Surat Selesai Penelitian dari Bappeda
Lampiran 5	Outlen Pertanyaan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para pengambilan keputusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat.¹

Pemberlakuan undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membawa perubahan fundamental dalam tata perubahan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan.

Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Oleh karena itu diberlakukannya kedua UU diatas, daerah mempunyai keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan keuangan secara mandiri.

Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah dan legislatif selaku lembaga wakil rakyat harus mampu menyusun anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif

¹Halim, Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Seri Bunga Rampai, 2010), h.35.

agar setiap pengalokasian anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan/organisasi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode). Dan alat manajemen dalam mencapai suatu tujuan.²

UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2018 menjadi dasar dalam menentukan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada visi misi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Periode Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018.

Keberhasilan sebuah pembangunan sektor ekonomi kabupaten sidenreng rappang akan dapat tercapai ketika pemerintah daerah dalam mengelola APBD kiranya dapat tepat sasaran dan tidak hanya sekedar mengutamakan pembangunan di beberapa wilayah yang ada di kabupaten sidenreng rappang saat ini memberikan pemerataan pembangunan terkhusus di wilayah infrastruktur sekiranya akan lebih mampu menambah pendapatan daerah itu sendiri karena pembangunan infrastruktur akan memicu kelaancaran roda perekonomian di kabupaten sidenreng rappang.

²Sahala Manalu, S.E., M.M., Stevi jimri Poluan, ST.MM., *Cara Akurat Menyusun Penganggaran Perusahaan Manufaktur*, (Malang : 2018), h. 11.

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, Pemerintah khususnya pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang maka harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara.

Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara/daerah perlu dibuat rencana tersebut dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik.

Permendagri 32 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperhatikan hal yakni penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017.³

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

³Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, h. 5.

(PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli tahun 2018.⁴

APBD Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Namun pada kenyataannya penetapan APBD biasanya bergeser dari 31 Desember.⁵

Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.

Secara manajemen Syariah, Permasalahan utama Perencanaan Anggaran Di Bidang Keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi Syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Maka, tidak pernah direncanakan misalnya, peminjaman dana yang mengandung unsur riba atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat.

Mengingat akan besarnya manfaat anggaran (APBD) bagi suatu organisasi/pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng

⁴Hendra Kariangan, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perspektif Hukum dan Demokrasi* (Bandung: Kencana, 2011), h. 23.

⁵Nurkholis, moh. Khusaini, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang: UB Press, 20019), h. 23.

Rappang, maka anggaran tersebut harus disusun secara baik dan sistematis sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada Analisis Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah).

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana manajemen yang di gunakan dalam melakukan penyusunan APBD di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang ?
- 1.2.2. Bagaimana analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah di Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan manajemen Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen yang digunakan dalam penyusunan APBD pada kantor BAPPEDA kab. Sidenreng Rappang.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kesesuaian Manajemen Syariah dalam Proses Penyusunan Perencanaan Anggaran.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
2. Penelitian ini di harapkan mampu menjadi refrensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan peneliti-peneliti yang mendalam.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di perkuliahan.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan saran kepada Pemerintah daerah khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang serta bagi peneliti-peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah khususnya pada BAPPEDA bukanlah hal yang baru. Sebelumnya telah ada peneliti yang membahasnya, namun peneliti ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya mengenai Proses perencanaan penyusunan anggaran pemerintah telah dilakukan oleh :

Nurbaya Program Studi Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Tahun 2018, dalam penelitiannya berjudul *“Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng”*. Hasil penelitian ini menunjukkan Penyusunan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Bantaeng dimulai dari penyusunan anggaran terlihat jelas bahwa penyusunan anggaran OPD harus berdasarkan dengan Renstra dan Renja yang kemudian di susun kedalam RKA, dimana program dan kegiatan yang diusulkan harus sinkron dengan visi, misi dan program kepala daerah sebagaimana yang tercantum yang RPJMD yang merupakan acuan dalam pembuatan anggaran.

Dalam penyusunan RKA OPD harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pencapaian prestasi kerja, dengan memperhatikan, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, serta standar pelayanan minimal. Perencanaan tahunan atau renja merupakan tahapan awal perencanaan yang

dilaksanakan setiap tahun yang setiap awal tahun disusun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Penyusunan rencana anggaran diawali dengan penyampaian edaran Bupati tentang pedoman penyusunan anggaran, hal tersebut menjadi acuan dalam penyusunan draf renja, setelah itu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Musrembang, dari hasil Musrembang dibuat renja kemudian ditetapkan RKPD yang selanjutnya menerbitkan KUA-PPAS sebagai acuan penyusunan RKA OPD yang kemudian ditetapkan dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses dan tahapan penyusunan anggaran pada Dinas PMD,PP dan PA Kab.Bantaeng sudah sesuai dengan Pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni mulai dari penyusunan Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Laporan realisasi anggaran selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2015,2016 dan 2017 mengalami penurunan capaiannya yakni tahun 2015 97,26%, tahun 2016 97,49% dan tahun 2017 menurun yakni 93,12%. Tahun 2017 jumlah anggaran mengalami peningkatan karena pada tahun 2017 terdapat 2 unsur yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta urusan PMD, akan tetapi realisasinya pada tahun 2017 mengalami penurunan hanya mencapai 93,12% karena adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran anggaran sehingga pencairan dananya akan dilaksanakan pada triwulan IV dimana pada saat itu terjadi kekosongan kas di daerah yang berakibat pada peyerapan anggaran tidak tercapai 100%.

Pembuatan laporan realisasi pada Dinas PMD,PP dan PA Kab. Dantaeng telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yakni mulai pada tahap penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang mencakup pendapatan, belanja, dan modal.⁶

Judisty Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Tahun 2014, dalam penelitiannya berjudul “*Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran 2014*”. Hasil penelitian ini menunjukkan penyusunan anggaran di Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado di mulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategi (RESTR) Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan setiap strategi pembangunan pada tahun anggaran 2014 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado.

Hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, penyusunan anggaran pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado tahun anggaran 2014 telah sesuai Pemendagri No.27 Tahun 2013 yang meliputi tahapan mulai dari penyusunan RKPD, KUA/PPAS hingga RKA SKPD dengan baik sehingga dapat menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD). Penyusunan anggaran pada kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado sudah disajikan dalam bentuk siklus anggaran daerah. Kiranya diharapkan pada penyusunan anggaran di tahun selanjutnya.

⁶Nurbaya, *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng* (Bantaeng : Program Studi Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, 2018).

Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado harus lebih baik lagi dalam menyusun anggaran tahun selanjutnya, agar dapat menyajikan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) yang efisien dan efektif. Untuk itu, Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado lebih banyak mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pegawainya yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM namun juga dapat menghasilkan RKA-SKPD yang transparan, efisien dan efektif demi tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁷

Fitra Amalia Nur Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014 dalam penelitiannya berjudul *“Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”*. Hasil penelitian ini menunjukkan penyusunan anggaran berbasis kinerja difokuskan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan guna menganalisis pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif, sedangkan periode waktu analisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja yang disusun oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang ditujukan dalam kegiatan dengan keluaran dari hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dari hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Perencanaan aktivitas pelaksanaan penyusunan

⁷Judisty Kaumbang, *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran*(Manado: Jurusan Ekonomi dan Bisnis, 2014).

anggaran berbasis kinerja, khususnya pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditekankan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Berdasarkan data penelitian yakni Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan anggaran untuk 2 tahun terakhir (2012 dan 2013) yang diperoleh dari Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat maka penelitian ini diawali oleh penilaian biaya yang dianggarkan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan anggaran belanja surat menyurat dengan standar biaya untuk menilai apakah anggaran belanja yang disusun sesuai dengan platon atau standar biaya yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan rencana kerja (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran maka akan disajikan pertandingan harga satuan berdasarkan RKA dan DPA untuk kegiatan surat menyurat tahun 2012 yang dapat dilihat perbandingan antara standar biaya dengan RKA dan DPA yang diperoleh dari Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka Biro Umum dalam membuat anggaran sudah berdasarkan standar harga satuan yang telah ditetapkan sebelum penyusunan RKA dan DPA. Dari hasil analisis diatas, belanja yang dianggarkan dalam kegiatan surat menyurat sudah wajar karena harga satuan yang ditentukan baik dalam RKA maupun DPA sudah sesuai dengan standar biaya yang telah ditentukan.⁸

⁸Fitra Amalia Nur, *Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, (makassar : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar2014).

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Perencanaan

Menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. teori ini terdiri dari empat teori pendukung yaitu :

a. *Expectancy Theory* (Teori Harapan)

Victor Vroom mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan internal, tiga asumsi pokok Vroom dari teorinya adalah sebagai berikut :

1. Suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu.
2. Hasil tersebut punya nilai positif baginya.
3. Hasil tersebut dapat dicapai dengan usaha yang dilakukan seseorang.

Dengan kata lain motivasi, dalam teori harapan adalah keputusan untuk mencurahkan usaha.

b. *Goal Setting Theory* (Teori Penetapan Tujuan)

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat macam mekanisme motivasional, yakni, pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya, ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-tencana kegiatan.

c. *Reinforcement Theory* (Teori Penguatan)

B.F.Skinner mengemukakan, teori ini didasarkan atas hukum pengaruh. Tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Rangsangan yang didapat akan mengakibatkan atau memotivasi timbulnya respon dari seseorang yang selanjutnya akan menghasilkan suatu konsekuensi yang akan berpengaruh pada tindakan selanjutnya.

Konsekuensi yang terjadi secara berkesinambungan akan menjadi suatu rangsangan yang perlu untuk direspon kembali dan menghasilkan konsekuensi lagi. Demikian seterusnya sehingga memotivasi mereka akan tetap terjaga untuk menghasilkan hal-hal yang positif.⁹

1. Fungsi-fungsi Perencanaan

a. Perencanaan sebagai pengarah

Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi berja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan tararah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarah dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.

⁹26-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-danproses.html?m=1. (diakses pada 02 Juli 2019,pukul 19.35).

b. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian

Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering kali sesuai dengan apa yang kita pikirkan, akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari.

c. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya

Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan, dengan cara bagaimana penggunaannya, dan untuk penggunaan apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalisasikan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat.

d. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas

Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang

mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh perusahaan.¹⁰

2.2.2. Teori Penyusunan

Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur.

2.2.3. Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara.¹¹

1. Unsur-unsur Pemerintah Daerah menurut Tjahja Supriatna yaitu :
 - a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara.
 - b. Pemerintah daerah di atur oleh hukum.
 - c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
 - d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.

¹⁰Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajeme*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 97-98.

¹¹Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, (Malan: UB Press, 2019), h. 14.

- f. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah puridiksinya.

2.2.4. Teori Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹²

Menurut Deddi, menyatakan bahwa anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan, berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil.

1. Adapun Tujuan Anggaran meliputi :

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan
- d. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

¹²Dr. Hendra Karianga, S.H, M.H., *Carut Marut Pengelolaan Keangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 47.

- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran, lebih jelas dan nyata terlihat
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.¹³

2.2.5. Teori Manajemen Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek tujuannya adalah agar hasil-hasil yang di targetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.¹⁴

Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).¹⁵

Karena menyadari adanya pengawasan dari yang maha tinggi, yaitu Allah SWT. Yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah az-Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - ٧ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - ٨ -

¹³<http://nichonotes.blogspot.com/> penganggaran-definisi-fungsi-manfaat (diakses pada 14 Juni 2019,pukul 15.20).

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), h. 175-179.

¹⁵Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 5.

Terjemahannya :

“Dan di antara mereka ada orang berdoa : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (az-Zalzalah: 7-8).¹⁶

1. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah yaitu :

- a. Menegakkan keadilan suatu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang.
 - b. Melakukan musyawarah, dalam menjalankan aktivitas manajerial seorang manajer harus selalu melakukan musyawarah, konsultasi dan kerjasama dengan manajemen atasannya, manajemen yang setingkat dan dengan bawahannya. Dalam teori manajemen Islam menekankan bermusyawarah dan kerjasama dalam menangani persoalan.
 - c. Profesional, seorang manajer yang profesional mempunyai kompetensi, baik teknis sosial, manajerial dan intelektual, dalam melakukan pekerjaan yang seang atau yang akan di jalankannya sesuai dengan bidang atau spesialisasinya masing-masing. Dan membangun sebuah *mindset*(pradigma,nilai dasar dan keyakinan dasar) yang operasional dan konstruktif.
2. Tujuan dan sasaran utama Manajemen Syariah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka. Secara terperinci tujuan manajemen Syariah meliputi :
- a. Menerapkan Syariat Islam dalam beribadah, muamalat dan hukum.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 99.

- b. Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hambaNya yang menuntut pencurahan upaya materi dan intelektual untuk pemanfaatan daratan dan lautan.
- c. Menegakkan kekhalifahan di muka bumi yang merefleksikan perangkat hukum pemerintahan dan mengatur hubungan di antara anggota masyarakat.
- d. Membentuk masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.¹⁷

3. Fungsi-fungsi Manajemen yaitu :

1. Fungsi perencanaan

- a. Menetapkan tujuan dan target bisnis.
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut.
- c. Menentukan sumber-sumber daya yang di perlukan.
- d. Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.¹⁸

2. Fungsi Pengorganisasian

Secara khusus, pengorganisasian adalah memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya organisasi. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pengorganisasian ialah dengan mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi.¹⁹

- a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang di perlukan.

¹⁷Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 250.

¹⁸Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : 2006), h.

¹⁹ Sondang P dan Siagian MPA, *fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 60-70.

- b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
 - c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja.
 - d. Kegiatan penetapan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.²⁰
3. Fungsi Pengimplementasian
- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
 - b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
 - c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

4. Fungsi Pengendalian

Pengendalian manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan (*deviasi*) dan mencatat besar kecilnya penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara efektif guna mencapai tujuan perusahaan.²¹

Secara manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses control dan pengawasan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan

²⁰Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 11.

²¹Malayu S.P dan Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 245.

secara efektif bila sebuah organisasi atau seorang manajer melaksanakan langkah-langkah yang terstruktur secara baik, dengan dirangkaikan dengan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis agar tercapai suatu tujuan tertentu apabila mengikuti alur pikir diatas.

Dalam Al-Qur'an di sebutkan sebagai berikut: Q.S.Al-Baqarah ayat 201-202

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - ٢٠١ -
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ - ٢٠٢ -

Terjemahannya :

“Dan diantara mereka ada orang berdoa : “Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharlah kami dari siksa neraka”. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagia dari pada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.”²²

2.3. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.3.1. Konsep Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian dan Unsur-Unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan Daerah. Selain itu APBD juga memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut

²²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h. 49.

sebagai Barang Milik Daerah (BMD), BMD diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.²³

2. Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber pemerintah yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Priode anggaran yang biasanya 1 tahun.
- e. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁴

3. Terdapat 3 struktur dalam Anggran pendapatan dan Pengeluaran Daerah yaitu :

- a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umu daerah yang menambah ekuitas dana.²⁵ Pendapan daerah Meliputih :

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah (PEMDA) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

²³Nurkholis, Moh. Khusaini, *Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja*, (Malang: UB Press, 2019), h. 23.

²⁴Sri Mulyani, *Analisis dan perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah*, (Bandung: Abdi Sistematika, 2016), h. 104.

²⁵Nurkholis, Moh. Khusaini, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang: UB Press, 2019), h. 23.

bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua pemerintah kas daerah yang menambah *ekualitas* dana dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah.²⁶

c. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana bersumber dari pengelolaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

2.3.2. Konsep Manajemen Syariah

Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi Syariah apabila manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, manajemen Syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini bisa dilihat pada surat Al An'am ayat 65 :

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ -٦٥-

Terjemahannya :

“Katakanlah (Muhammad), “Dia-lah yang Berkuasa Mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia Mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami Menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahaminya(nya)”.

Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. Manajemen Syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan

²⁶Barata, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, (Jurnal Ekonomi PPs UGM, 2004), h. 90.

perencanaan, organisasi dan kontrol. Islam pun telah mengajarkan jauh sebelumnya adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat.²⁷

1. Manajemen sebagai ilmu

Sebagai ilmu, manajemen termasuk sesuatu yang bebas nilai atau berhukum asal mubah. Konsekuensinya, kepada siapaun umat Islam boleh belajar. Berkaitan dengan ini, kita perlu mencermati pernyataan Imam Al Gazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, Bab Ilmu. Beliau membagi ilmu dalam dua kategori ilmu berdasarkan takaran kewajiban :

- a. Ilmu yang dikategorikan sebagai fardhu ain yakni yang termasuk dalam golongan ini adalah ilmu-ilmu *tsaqofah* bahasa Arab, sirah nabawiyah, Ulumul Quran, Ulumul hadist, Tafsir, dan sebagainya.
- b. Ilmu yang terkategori sebagai fardhu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh salah satu atau sebagian dari kaum muslimin. Ilmu yang termasuk dalam kategori ini adalah ilmu-ilmu kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Diantaranya seperti ilmu kimia, biologi, fisika dan manajemen.

2. Manajemen sebagai Aktivitas

Dalam ranah aktivitas, Islam memandang bahwa keberadaan manajemen sebagai suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam terwujud pada di fungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, aqidah dan Syariah difungsikan sebagai asas dan

²⁷ Didin & Hendri, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003),h. 48.

landasan pola pikir. Sedangkan sebagai kaidah amal, Syariah di fungsikan sebagai kaidah amal, Syariah di fungsikan sebagai tolak ukur (standar) perbuatan.

Karenanya, aktivitas manajemen yang dilakukan haruslah selalu berada dalam koridor Syariah, Syariah harus menjadi tolak aktivitas manajemen. Senafas dengan visi dan misi penciptaan dan kemusliman seseorang, maka Syariahlah satu-satunya yang menjadi kendali amal perbuatannya. Hal ini berlaku bagi setiap Muslim, siapa pun, kapan pun dan di mana pun. Inilah sebenarnya penjabaran dari kaidah ushul yang menyatakan *al aslu fi al-af al attaqoyyadu bi al-hukmusy syari* , yakni hukum asal suatu perbuatan adalah terikat pada hukum syara yang lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

2.4. Kerangka Pikir

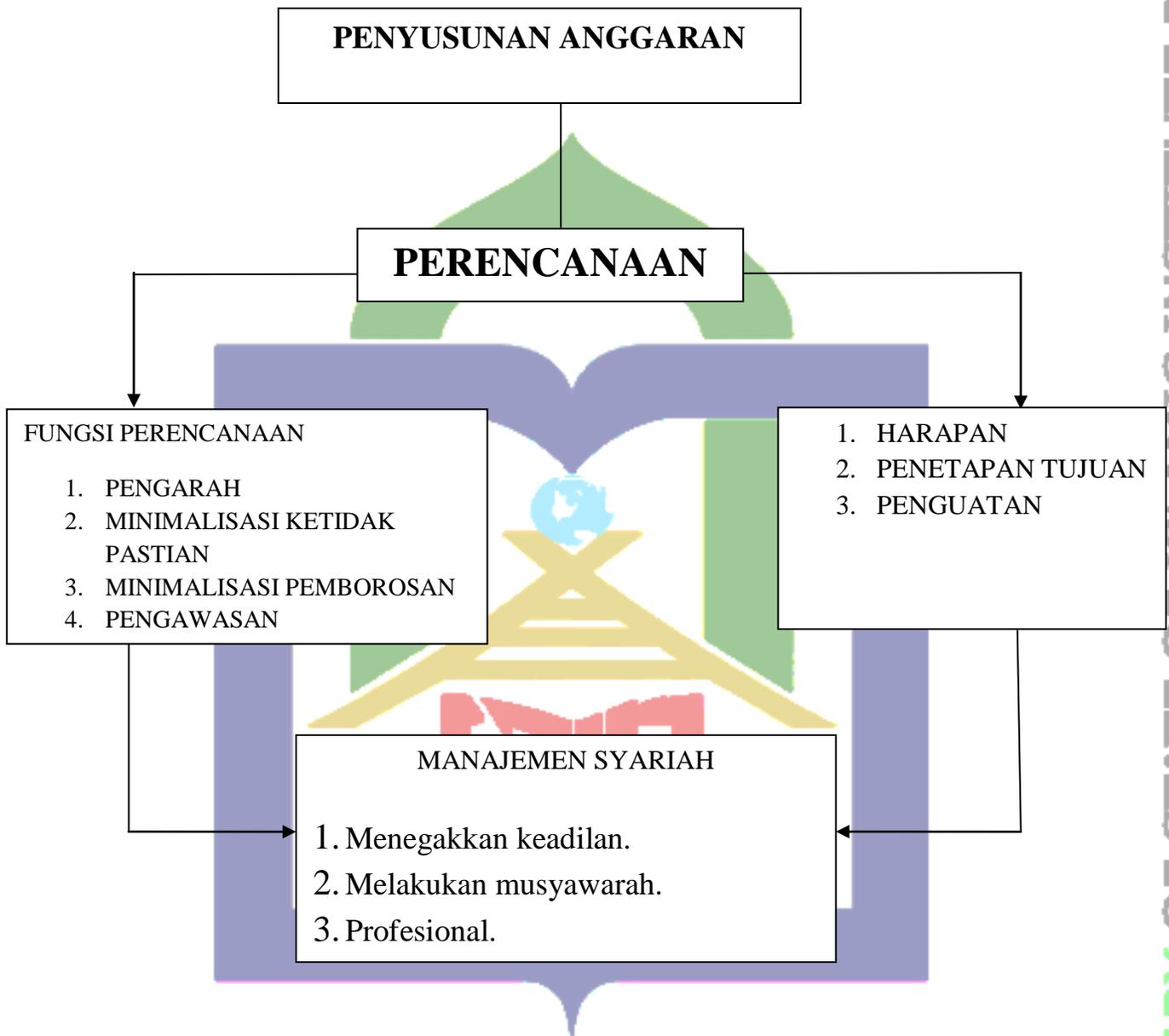
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.²⁸

Menurut Sugiyono, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian.

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, yaitu sebagai berikut .

²⁸Sugiono, *metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91.

2.5. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, fokus penelitian dan sumber data²⁹ yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian, maka uraian sebagai berikut :

3.1. Jenis penelitian

Peneliti ini menggunakan peneliti kualitatif, dan Observasi yang dilakukan dengan mengamati objek yang akan diteliti setelah observasi lalu dilakukan pengumpulan data yang kemudian dilakukan analisis data³⁰ dengan melihat kesesuaiannya dengan Manajemen Syariah sehingga menjadi sebuah anggaran yang barmutu.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi penelitian ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng Rappang

3.2.2. Waktu penelitian ini 1 bulan lebih yang merupakan waktu yang cukup untuk memperoleh informasi serta data yang di inginkan peneliti.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang kita akan laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian

²⁹Tim Penyusunan, *pedoman karya ilmiah (MAKALAH DAN skripsi)* Edisi Revisi pare-pare IAIN Pare-pare,2013,h.34.

³⁰Lexy Moleong, *Meodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2010), h. 5.

kualitatif dinamakan fokus.³¹ Adapun penelitian ini berfokus pada Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah). Dimana studi ini membahas tentang penyusunan anggaran berdasarkan manajemen Syariah.

3.4. Jenis dan Sumber Data yang di gunakan

3.4.1. Jenis Data

Dalam Penelitian ini, data yang diperlukan adalah data primer maupun data sekunder. Data primer meliputi informasi langsung yang diperoleh dari para pelaku yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah khususnya pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. Data sekunder terdiri dokumen-dokumen penyusunan anggaran serta instrumen hukum yang terkait dengan penyusunan anggaran. Data sekunder umumnya berasal dari pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini diperlukan data sebagai bahan informasi untuk dijadikan alat analisis adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan, atau pulikasi dan hasil wawancara.³²

3.4.2. Sumber data

Menurut Suharsimin, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Orang yaitu berupa orang yang memberikan data berupa tingkah laku objek yang diteliti jawaban lisan melalui wawancara jawaban tertulis dalam penelitian ini.

³¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h62.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : 2010), h. 106.

2. Tempat yaitu sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang menjanjikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
3. Dokumen yaitu catatan-catatan yang dapat menjadi data, sumber data berupa yang menjanjikan tanda-tanda berupa huruf, atau angka.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang digunakan adalah:

3.5.1. Observasi

yaitu mengamati objek-objek yang diteliti sehingga diperoleh informasi lebih awal tentang keadaan tempat penelitian.

3.5.2. Dokumentasi

Adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³³ Dalam hal ini, penelitian akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.5.3. Wawancara

adalah instrument pengumpul data yang digunakan untuk memperjelas data yang dipandang masih kurang jelas dengan melakukan wawancara kepada 3 orang pegawai Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap berpengaruh penting terhadap penyusunan anggaran pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.

³³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami, supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada informan. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan³⁴. Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

1. Reduksi data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian di pilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.³⁵

2. Penyajian data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka

³⁴ Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000).

³⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 86

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.³⁶

3. Kesimpulan atau verifikasi data

Dari data yang di dapat oleh peneliti di lapangan peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang di peroleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru³⁷. Adapun teknik verifikasi yang di gunakan yaitu verifikasi sumber dan dokumen.



³⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 249

³⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Manajemen yang digunakan dalam melakukan penyusunan APBD di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang

4.1.1. Perencanaan

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Perencanaan dan Penganggaran Daerah selain merujuk pada UU 32/2004, UU 23/2004 juga diatur oleh UU No. 25/2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rencana SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rencana renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD.

Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- c. Tahapan perumusan rancangan renja SKPD
- d. Tahapan penyajian rancangan renja SKPD

dapat dilihat dalam gambar tersebut dibawah ini :



Gambar 4.1. Skema Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Merujuk pada keempat UU di atas maka perencanaan dan penganggaran daerah terutama dari segi prosesnya menjadi kewenangan daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP). Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat Kecamatan dan seterusnya.

Bappeda Kab. Sidenreng Rappang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk

berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda Kab. Sidenreng Rappang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Misi	Tujuan	sasaran
<p>Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan</p>	<p>Meningkatkan produksi sektor pertanian secara umum.</p> <p>Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.</p> <p>Mengembangkan Modernisasi Pertanian.</p>	<p>Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan.</p> <p>Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.</p> <p>Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir.</p> <p>Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sup sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.</p> <p>Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir.</p> <p>Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani.</p>

	<p>Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.</p>	<p>Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar.</p> <p>Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif.</p> <p>Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.</p> <p>Meningkatnya kelestarian sumber daya air.</p> <p>Berkembangnya produk pertanian organik.</p>
<p>Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.</p>	<p>Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur perekonomian daerah.</p> <p>Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.</p>	<p>Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian.</p> <p>Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur perekonomian daerah.</p> <p>Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif.</p> <p>Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM berbasis pertanian.</p> <p>Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.</p> <p>Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.</p>
	<p>Meningkatkan daya saing daerah.⁷</p>	<p>Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang</p>

		<p>mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.</p> <p>Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan klaster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas.</p>
<p>Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan</p>	<p>Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama.</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit.</p> <p>Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi.</p> <p>Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.</p> <p>Terkendalinya pertumbuhan penduduk.</p> <p>Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat.</p> <p>Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.</p>
<p>Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antara wilayah.</p>	<p>Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur.</p>	<p>Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh.</p> <p>Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang</p>

		<p>terintegrasi antar kota dan antar wilayah.</p> <p>Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas.</p> <p>Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin.</p> <p>Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah.</p> <p>Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai.</p> <p>Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.</p>
Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas.	<p>Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat.</p> <p>berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.</p>
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.	Meningkatkan kinerja Pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.	<p>Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi.</p> <p>Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan.</p> <p>Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang</p>

	<p>Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan, Penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat.</p> <p>Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.</p> <p>Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.</p>	<p>berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> <p>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat.</p> <p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.</p> <p>Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.</p> <p>Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.</p> <p>Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.</p> <p>Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.</p>
--	---	---

(Sumber BAPPEDA Kab.Sidenreng Rappang)

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 72,23 % dari total anggaran Rp. 1.602.336.633.000,- yang dialokasikan dengan realisasi sebesar Rp.

1.157.416.397.124,23,- Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yaitu sebesar Rp. 394.355.446.000,- atau 42,93 persen dari total anggaran belanja langsung. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran berkembangnya produk pertanian organik dengan indikator cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu sebesar Rp. 12.076.000,- atau 0,001 persen dari total anggaran belanja langsung.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 1.610.656.594.000,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	692.083.684.000,-	42,97
2	Belanja langsung	918.573.270.000,-	57,03
	Jumlah	1.610.656.594.000,-	100

(Sumber BAPPEDA Kab.Sidenreng Rappang)

4.1.2. Pengarah

Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi berja secara

sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan tararah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.³⁸

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Herwin, Selaku pegawai Bappeda yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran kebijakan kepala Daerah harus disinkronkan dalam dokumen perencanaan di Bappeda. Dan telah disesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁹

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Ihdijat Rea Bustani Selaku ASN BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Penyusunan anggaran telah sinkronisasi kebijakannya dengan pemerintah daerah dengan Kebijakan Pemerintah. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa penyusunan anggaran Bappeda telah disinkronkan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, karena jika tidak tepat waktu akan mengganggu proses penganggaran tersebut, Dalam penyusunan anggaran dapat dilihat disistem atau aplikasi.⁴⁰

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Muh.Fajri Salman Selaku Kabid Perencanaan Makro BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Penyusunan anggaran telah disinkronisasi dalam kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah. Dalam proses perencanaan anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah karena sudah seharusnya Pemerintah Daerah harus mengikuti aturan yang berlaku, Anggaran disusun sudah tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

³⁸Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : 2006), h. 11.

³⁹Herwin,S.IP,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal, 18 Desember 2019

⁴⁰Ihdijat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Desember 2019.

⁴¹Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019

Maka dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa dimana BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang mengenai tugas penyusunan perencanaan anggaran pemerintah Daerah tahun 2018 sudah sesuai dengan aturan yang ada dan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sementara itu, indikatornya adalah adanya kepala Daerah yang menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Rancangan Proritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS), rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Rancangan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepala Daerah kepada DPRD. SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD, kepala Daerah menyampaikan rancangan pemda kemudia menetapkan perda tentang APBD. Maka berdasarkan tahap tersebut, tahap keseluruhan yang sudah dilaksanakan BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan semua tugasnya dan kewenangannya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappeda kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai Pengarah. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 – 2018 yaitu ***“terwujudnya sidenreng rappang yang maju dan terkemuka bersamamasyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat”***, dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2018 yaitu ***“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”***, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 terdiri dari :

Tabel. 4.3. Program/Kegiatan Bappeda Tahun 2018

Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK,Materai,Perangko dan benda pos lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik,air dan telepon tiap bulannya
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya biaya perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor,uang lembur,ATK,barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya peralatan kebersihan
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan terbayarnya upah pihak ketiga
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor,belanja ATK,cetak,enggandaan,makan minum harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak ketiga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya penataan halaman gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
Pengadaan Meubelur	Tersedianya meubelur kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Meubelur	Terpeliharannya Meubelur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan
Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah
Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan SDM	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan SDM
Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan
Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya laporan fisik dan keuangan program kegiatan pelaksanaan APBD Kabupaten
Pengintegrsian sisti informasi pembangunan daerah (SDDKN)	Terlaksanya SIPD dan SDDKN
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinnnya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Terjalinnnya Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah Daerah
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)
Pengembangan sistim inovasi daerah	Tersusunnya data infrmasi potensi dan inovasi daerah
Peningkatan kapasitas data publikasi riset dan teknologi	Tersedianya data/informasi pembangunan bidang kelitbanan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program-program
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Meubileur	Terpeliharannya Meubileur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan
Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah
Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan SDM	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan SDM
Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan
Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya laporan fisik dan keuangan program kegiatan pelaksanaan APBD Kabupaten
Pengintegrsian sisti informasi pembangunan daerah (SDDKN)	Terlaksanya SIPD dan SDDKN
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinnnya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Terjalinnnya Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah Daerah
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)
Pengembangan sistim inovasi daerah	Tersusunnya data infrmasi potensi dan inovasi daerah
Peningkatan kapasitas data publikasi riset	Tersedianya data/informasi pembangunan

dan teknologi	bidang kelitbanan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program-program pendampingan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersusunnya dokumenn memorandum program sektor sanitasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD. Kabupaten, propinsi dan nasional
Penetapan RKPD	Terlaksananya penyusunan rancangan/draft akhir RKPD dan penetapan RKPD
Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya montoring dan evaluasi
Penetapan (Revisi) RPJMD	Tersusunnya RPJMD tahun 2014-2018
Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok
Koordiansi penusunan data DAK.APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	Tersedianya laporan monev DAK.APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi
Pelaksanaan asistensii RKA dan RKAP	Terlaksananya asistensii RKA dan RKAP
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya sinkronisasi program

bidang Ekonomi	kegiatan bidang ekonomi
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TKPKD
Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang sosial
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri
Operasional Pendamping WISMP	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif
Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Revisi Rencana Tata Ruang Eilayah	Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW
Program Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

(Sumber Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang)

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

4.1.3. Minimalisasi Ketidak Pastian

Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering kali sesuai dengan apa yang kita pikirkan, akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan

kita, sehingga menimbulkan ketidak pastian bagi perusahaan. Ketidak pastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan diharapkan ketidak pastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari.⁴²

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Bapak Herwin, Selaku Kasubid Perencanaan Makro yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di Bappeda Kab. Sidenreng Rappang dilaksanakan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tahapannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka dari itu sangat diperlukan yang namanya partisipasi Masyarakat terlebih dahulu dimana masyarakat yang mengusulkan program kerja mereka.⁴³

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Ihdijat Rea Bustamin Selaku ASN BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Perencanaan anggaran sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kami dan harus direncanakan terlebih dahulu sebelum anggaran dikeluarkan dan kami harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara musrembang dimana masyarakat nantinya yang akan mengusulkan program kerja.⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa dalam melakukan sebuah proses penyusunan perencanaan anggaran di kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang sudah sesuai, dengan adanya jadwal yang telah ditetapkan dan telah melibatkan partisipasi masyarakat terlebih dahulu untuk mengusulkan program kerja apa yang nantinya mereka usulkan maka dari itu dengan adanya kegiatan musrembang ini dapat memudahkan proses penyusunan anggaran tersebut.

⁴²Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajeme*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95-96.

⁴³Herwin, S.IP,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Desember 2019

⁴⁴Ihdijat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Desember 2019

Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

4.1.4. Minimalisasi Pemborosan Sumber Daya

Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan, dengan cara bagaimana penggunaannya, dan untuk penggunaan apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalisasikan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat.⁴⁵

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan tersosialisasikannya dokumen RPJMD ke desa dan kelurahan.

Indikator menghasilkan beberapa kegiatan yang telah diakomodir dalam APBD :

1. Koordinasi Pemecahan Masalah Masalah Daerah
2. Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

⁴⁵Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : 2006), h. 30.

3. Operasionan Fisik Prasarana
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang
6. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
7. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tabel 4.4. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum.	94,24	-	-	282,50
Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (LPK).	100	100	100	100
Rata-rata capaian	94,24	100	100	282,50

(Sumber BAPPEDA Kab.Sidenreng Rappang)

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa** Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 282,50 persen pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 192,41 persen.

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Bapak Ihdijat Rea Bustamin, Selaku ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng

rappang yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Penyusunan perencanaan anggaran disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya yang dimiliki.⁴⁶

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Erwin Selaku Kasubid Perencanaan Makro BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Dalam Penyusunan perencanaan anggaran harus senantiasa berpijak pada kenyataan yang ada disertai dengan penggunaan asumsi-asumsi untuk masa depan, sehingga sasaran yang ingin dicapai benar-benar dapat terwujud.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

⁴⁶Ihdiyati Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Desember 2019

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Manajemen usaha tani** dengan beberapa Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.403.957.950,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.473.819.350,- atau 104,98 % Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %.
- b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 2.242.739.400,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.092.260.250,- atau 93,29% Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 135 % berarti tingkat efisiensi sebesar 41,71%.

Tabel 4.5. Pencapaian antara capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2015	2016	2017	2018
Persentase Koordinasi dan rumusan kebijakansumber daya alam	100	100	100	100

Rata-rata capaian	100	100	100	100
-------------------	-----	-----	-----	-----

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terkendalinya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018.

4.1.5. Pengawasan

Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh perusahaan.⁴⁷

Yang bertindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah :

⁴⁷Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 97-98.

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK adalah satu-satunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut diatas.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah lembaga pemerintah Non-Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan dana APBD.

3. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)

Bawasda adalah pengawas internal suatu pemerintah kabupaten/kota yang bertugas meng-audit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi/lembaga yang dibiayai oleh APBD. Bawasda mempunyai tugas pokok membantu bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karakteristik anggaran masih mengalami perubahan-perubahan sehingga diperlukan pula informasi

terkini tentang perubahan yang telah dan sedang berlangsung mengenai proses penganggaran beserta ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018, seperti yang tertuan dalam rencana strategi Bappeda Kab. Sidenreng Rappang tahun 2015-2018 sebagai berikut :

Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Renja 2018

Sasaran	Tujuan	Indikator
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan	Keselarasan perencanaan pembangunan
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	Tercapainya Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
	Meningkatnya partisipasi seluruh stakeholders dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	
	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota	

	menengah dan besar	
Menyediakan dan mengelola data/informasi, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan data dan informasi	Kemudahan mengakses data dan informasi
Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak	Terselenggaranya bimbingan teknis untuk peningkatan SDM Perencana	Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua piha

(Sumber BAPPEDA Kab.Sidenreng Rappang)

Dalam menjalankan tugas suatu penyusunan anggaran, manajemen sangat dibutuhkan. Oleh karena itu setiap organisasi yang melakukan penyusunan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan, berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten SidenrengRappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala.

4.1.6. Harapan

Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi kerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan tararah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.⁴⁸

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kepala Bappeda pada tahun 2018 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam perjanjian kinerja tahun 2018, Bappeda telah melaksanakan 17 program 30 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum perubahan sebesar Rp.1.602.336.633.000.-, yang dialokasikan dengan realisasi sebesar Rp.1.157.416.397.124,23,- jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentral produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh Yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang dan perhubungan yanitu sebesar Rp.394.355.446.000,- atau 42.93 persen dari total anggaran belanja langsung. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran berkembangnya produk pertanian organik dengan indikator cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup

⁴⁸26-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-dan-proses.html?m=1. (diakses pada 02 Juli 2019,pukul 19.35).

yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu sebesar Rp.12.076.000,- atau 0,001 persen dari total anggaran belanja langsung.

4.1.7. Penetapan Tujuan

Sebelum sesuatu organisasi menetapkan suatu tujuan, terlebih dahulu harus menentukan misi dan visi atau maksud organisasinya. Tujuan umum atau sering juga disebut sebagai rencana strategi tidak dapat berfungsi atau berjalan sebelum dijabarkan terlebih dahulu kedalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci sesuai dengan jenjang manajemen sehinggah membentuk hirarki tujuan. Penetapan tujuan-tujuan strategi akan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta mengikat sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang.⁴⁹

Seperti hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Bapak Muh. Fajrin Salman, Selaku Kabid Perencanaan Makro yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Anggaran Bappeda telah disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah Daerah dan di tentukan dalam RPJMD dan RKPD.dan anggaran juga telah disesuaikan dengan penyelenggaraan pemda sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu dalam proses penyusunan anggarannya penetapan tujuanlah yang utama dilakukan agar dalam proses penyusunannya terarah dan tepat waktu yang telah ditentukan oleh pemda.⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyusunan perencanaan anggaran di Bappeda Kab.Sidenreng Rappang bahwa dalam penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Sedangkan sasaran

⁴⁹26-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-dan-proses.html?m=1. (diakses pada 02 Juli 2019,pukul 19.35).

⁵⁰Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,terinci,terukur dan dapat dicapai.

Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel. 4.7. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Program Pendukung
1	Meningkat nya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Palawija, Holtikultura dan perkebunan	<p>Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.</p> <p>Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan.</p> <p>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan.</p> <p>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam.</p> <p>Program Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.</p> <p>Program Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu.</p> <p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan.</p>
2	Meningkat nya Produksi Peternakan dan Perikanan	<p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.</p> <p>Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan.</p> <p>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.</p> <p>Program pengembangan budidaya perikanan.</p> <p>Program Pengembangan Perikanan Tangkap.</p> <p>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.</p>
3	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari Hulu ke Hilir	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
4	Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sub sektor pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan	Program Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan.
5	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian Mutakhir	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen usaha tani	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan.
7	Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
8	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Air	Program Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
9	Berkembangnya Produk Pertanian Organik	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
10	Meningkatnya perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
11	Meningkatnya pembinaan / koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	Program Pengembangan IKM. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
12	Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
13	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit	Program standarisasi pelayanan kesehatan. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
14	Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Peningkatan Kesehatan MAsyarakat
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program perbaikan gizi masyarakat dengan pemantauan status gizi masyarakat.
16	Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan dan kesling	Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
17	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

	belajar 12 tahun	Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga kependidikan dengan kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
18	Berkembangnya Pendidikan Tinggi	Program Pendidikan Tinggi
19	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social.
20	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh	<p>Program pembangunan jalan dan jembatan dengan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.</p> <p>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.</p> <p>Program Pembanguna Turap / Talud / Bronjong.</p> <p>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.</p> <p>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.</p>
21	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas	<p>Program perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu.</p> <p>Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.</p> <p>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.</p> <p>Program penyediaan dan pengelolaan air baku</p> <p>Program pengembangan, pengelolaan koservasi sungai danau dan SDA.</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.</p> <p>Program pembangunan infrastruktur pedesaan.</p> <p>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun.</p> <p>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah/besar.</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah</p>

22	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan irigasi lainnya. Program pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
----	--	---

4.1.8. Penguatan

Secara substansial, penguatan mempunyai makna menguatkan hal atau sesuatu yang tadinya lemah untuk menjadi lebih kuat, penguatan ini didasari karena adanya sesuatu yang lemah, maka harus ada usaha untuk menjadi kuat.⁵¹

Sehubungan dengan adanya penguatan dalam sebuah organisasi harus membutuhkan yang namanya *Coordinating* (Kepemimpinan) yakni memotivasi, memimpin dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang-orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat, jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin. Dalam suatu perusahaan, jika ada atasan yang tidak mengurus kepentingan perusahaannya maka ia bukan seorang pemimpin yang baik.

Seperti hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Bapak Muh. Fajrin Salman, Selaku Kabid Perencanaan Makro yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :
penyusunan anggaran pasti melibatkan partisipasi masyarakat karena dalam proses perencanaan dilakukan dengan musrembang terlebih dahulu dimana masyarakat yang mengusulkan program kerja mereka yang akan mereka kerjakan nantinya.⁵²

⁵¹26-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-danproses.html?m=1. (diakses pada 02 Juli 2019, pukul 19.35).

⁵²Muh. Fajri Salman, SKM., M. Kes., Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Ihdijat Rea Bustani selaku ASN BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas Musrembang, proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah (dinas, instansi) sampai dengan penyiapan draft usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.⁵³

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

4.2. Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Sidenreng Rappang Berdasarkan Manajemen Syariah

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus di ikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara *asl-asalan*. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah STW. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang di syartkan dalam ajaran Islam.

Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan

⁵³Ihdijat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Desember 2019

dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).⁵⁴ Konsep Syariah yang diambil dari hukum al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat mengapai target yang ditujui yang membedakan manajemen Syariah dengan manajemen umum adalah konsep *Ilahiyah* dalam implementasi sangat berperan.

Manajemen dalam Islam dikembangkan berdasarkan tema *tadbir*, ditinjau dari bentuk *lafadz*-nya, bersifat *mutlaq* yakni *lafadz* yang belum ada kaitannya atau batasan dengan *lafadz* lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya. Kemudian tema *tadbir* menjadi *muqayyad* berarti suatu *lafadz* yang terbatas atau terikat oleh *lafadz* lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya. Maksudnya luas jangkauannya telah dibatasi sedikit dari waktu masih *mutlaq*-nya. Walaupun demikian keterbatasan *lafadz muqayyad* seperti *lafadz* pada ayat-ayat diatas tidak menghilangkan jangkauannya kepada sifat-sifat lain, artinya sifat-sifat lain masih ada padanya.⁵⁵

Dengan demikian *mutlaq* dan *muqayyad*-nya *lafadz* yang dimaksud oleh Muchtar dan Manna Khalil Al-Qattan tidak ada perubahan yang mendasar. Secara garis besar adalah *lafadz mutlaq* dapat dimaknai sebagai *lafadz* yang masih bersifat umum dan *lafadz muqayyad* adalah *lafadz* yang bersifat khusus. Maka Jamil menringkasnya menjadi prinsip-prinsip manajemen Syariah, sebagai berikut :

4.2.1. Menegakkan Keadilan

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam penyusunan, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun

⁵⁴Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 5.

⁵⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : AMP YKPN, 2005), h. 45.

dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasa pun harus adil. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain. Meski benar bahwa keadilan tidak pernah di pahami secara lengkap. Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideology Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak stengah-tengah, tanpa mengacu pada status sosial, asset financial, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Qur'an telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegangan pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.⁵⁶

Kata kunci yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *'adl* dan *qish*. *Adl* mengandung pengertian *sawiyat* dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *Zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). *Qish* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata. *Taqassata* salah satu kata derivasinya juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat, dan *qistas*, kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat. Sehingga kedua kata di dalam al-qur'an yang digunakan untuk menyatakan keadilan yakni *'adl* dan *qish* mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi pematari.

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Bapak Herwin, Selaku Kasubid Perencanaan Makro yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

⁵⁶Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 265.

Dalam penyusunan anggaran di Bappeda sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya menjadi Adil.⁵⁷

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Ihdijat Rea Bustamin Selaku ASN BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran tentu saja harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan karena menjalankan sebuah tugas itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan jadwal dan tahapan penyusunan anggarannya pun sudah sesuai aturan yang berlaku.⁵⁸

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Muh.Fajri Salman Selaku Kabid Perencanaan Makro BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Dalam Proses penyusunan perencanaan anggaran haruslah selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan karena dengan adanya itu kita juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengajukan usulan program kerja seperti apa yang nantinya mereka kerjakan.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyusunan perencanaan anggaran di Bappeda Kab. Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan karena harus selalu memperhatikan itu pada saat proses penyusunan anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa deskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya ada sehingga selalu merasa Adil dan patut dalam menjalankan suatu tugas.

Dalam hal ini di jelaskan dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 :

⁵⁷Herwin, S.IP,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Desember 2019

⁵⁸Ihdijat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19 Desember 2019

⁵⁹Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -٨-

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Maidah: 8)⁶⁰

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

Tabel. 4.8. Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja utama	Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan,penjawija,holitukultural dan perkebunan.	Peningkatan hasil produksi pertanian tanaman pangan,palawija, hotikultura dan perkebunan.	8.760.426.000,-	0,95
2.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.	Peningkatan produksi peternakan.	2..360.697.000,-	0,26
3.	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir.	Panjang jalan tani yang terbangun.	670.632.000,-	0,07
4.	Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sub sektor pertanian dan perkebunan,peternakan dan perikanan.	Sarana dan prasarana penyuluh perikanan.	137.460.000,-	0,01

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir,h. 75

5.	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian mutakhir.	665.095.000,-	0,07
6.	Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani.	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis.	1.403.957.950,-	0,15
7.	Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.	Persentase koordinasi dan rumusan kebijakan sumber daya alam.	33.775.000,-	0.004
8.	Meningkatnya kelestarian sumber daya air.	Tersedianya sumber air permukaan dan air tanah dalam untuk kebutuhan pada lahan sawah tadah hujan dan perkebunan.	34.992.186.900,-	3,81
9.	Berkembangnya produk pertanian organik.	Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup.	12.076.000,-	0,001
10.	Meningkatnya perlindungan konsumen.	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP.	54.000.000,-	0,04
11.	Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM.	Cakupan bina kelompok IKM.	367.787.000,-	0,04
		Cakupan jumlah IKM aktif dan produktif.		
		Cakupan jumlah IKM baru.		
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.		
		Pertumbuhan industri.		

12.	Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.	Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum.	4.219.244.000,-	0,46
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (LPK).		
14.	Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan.	39.937.196.000,-	4,35
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar (akreditasi puskesmas).		
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.	Pemantauan status Gizi.	118.200.000,-	0,01
		Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.		
16.	Meningkatnya hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan dan kesing.	Persentase penduduk yang menggunakan air minum layak dan berkelanjutan.	120.298.000,-	0,01
		Persentase terjaminnya keamanan makanan.		
17.	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.	Guru berkualifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan.	730.740.000,-	0,08
		Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan.		
18.	Berkembangnya pendidikan tinggi.	Ketersediaan sarana dan prasarana perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta	901.505.000,-	0,10

		kualifikasi/kualitas tenaga pendidikan (Dosen) dan pendidikan yang berkompetensi.		
19.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat.	Persentase kesejahteraan imam, petugas syara, guru TPA, mubaligh, tassabeh dan KIPRA.	10.381.070.500,-	1,13
20.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah serta produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.	394.355.446.000,-	42,93
		Terlaksananya pembangunan Drainase/ gorong-gorong.	43.061.598.000,-	4,69
		Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan.	5.832.274.000,-	0,63
		Terpilihnya jalan dan jembatan.	124.532.763.000,-	15,56
		Terbangunnya infrastruktur jalan di wilayah strategi khususnya di pedesaan.	80.734.398.000,-	8,79
21.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas.	Jumlah dokumen perencanaan.	41.463.496.000,-	4,51
		Persentase rumah tangga bersanitasi.		
		Ratio rumah layak huni yang dibangun.		
		Cakupan layanan air minum perdesaan.		
		Luas kawasan kumuh perkotaan.		

		Meningkatnya nilai asset pemerintah daerah.		
		Meningkatnya pengendalian pencemaran pada media air, tanah dan udara.		
		Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpenuhi ruang terbuka hijau yang teduh, sejuk dan indah.		
22.	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah.	Rasio jaringan irigasi .		
		Jumlah daerah irigasi.		
		Cakupan luas areal irigasi yang dialiri.		
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	15.888.773.000,-	1,73
		Cakupan areal terdampak yang tertangani.		

(Sumber BAPPEDA Kab.Sidenreng Rappang)

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

4.2.2. Musyawarah

Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan 'No coment' misalnya, sebelumnya ia telah menyampaikan komentar. Dalam manajemen, komunikasi menjadi factor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju kehidupan yang diharapkan. Begitu akrabnya komunikasi dengan kehidupan manusia, sehingga manusia perlu komunikasi untuk menghindari keterhambatan.

Dalam manajemen, Komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai Musyawarah. Berkaitan dengan komunikasi yang komunikatif ini, al-Qur'an memberikan penjelasan dalam beberapa ayatnya dengan petunjuk *Lafadz qawlan* yang berbentuk kata kerja perintah (*amr*).

Seperti hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang kepada Bapak Herwin, Selaku Kasubid Perencanaan Makro yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas Musrembang, proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah (dinas, instansi) sampai dengan penyiapan draft usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.⁶¹

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa komunikasi yang sudah berjalan dengan baik, Melakukan Musyawarah melalui musrembang, berkesinambungan

⁶¹Herwin, S.IP,M.Si, Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Desember 2019

secara sehat, jujur, dan baik dan benar dan sesuai aturan yang berlaku. dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat, ketepatan penyampaian komunikasi ini.

Dengan adanya kegiatan Musrenbang ini akan menjadi dampak positif terhadap proses yang menguntungkan perusahaan. Setiap orang yang berkomunikasi dengan orang lain akan melalui proses diawali dari pengirim pesan yang akan menyampaikan pesan ke penerima pesan, lalu penerima pesan akan memberikan umpan balik ke pengirim pesan.

Dengan silaturahmi juga seseorang yang belum kenal satu sama lain. Bisa saling bertukar pikiran. Proses pertukaran pikiran inilah yang membuat penguatan komunikasi menjadi lebih baik. Kasih sayang merupakan sifat Allah yang sangat banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian maka kita sebagai manusia yang taat, percaya dan bertaqwa kepada-Nya, tentu harus berupaya untuk meneladani sifat keutamaan Allah tersebut dalam menjalani kehidupan, karena sesuai janji-Nya, Allah akan menjadikan kasih sayang ada di dalam hati orang-orang beriman dan beramal sholeh.

Sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 96 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا - ٩٦ -

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang”.*⁶²

Usulan usulan yang dihasilkan pada pelaksanaan Musrenbang dan reses Anggota DPRD dibahas dan dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 150

sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan berdasarkan budang koordinasi.

Sebgaimana tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai fungsi koordinasi terhadap proses perencanaan pembangunan maka dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mendapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat baik melalui pelaksanaan Musrenbang maupun hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 4.9. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	SASARAN	Indikator	Satuan	Target Tahun 2018
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Palawija, Holtikultura dan Perkebunan	Produksi padi	Ton	561,100
		Produksi jagung	Ton	43,300
		Produksi keledai	Ton	-
		Produksi cabe	Ton	285
		Produksi kakao	Ton	7,600
		Produksi jambu mente	Ton	1,200
		Produksi cengkeh	Ton	620
		Produksi lada	Ton	84

2	Meningkat nya Produksi Pernakan dan Perikanan	Sapi Kerbau Kuda Kambing Ayam ras pedaging Ayam buras Ayam ras telur Itik Daging Sapi Telur Perikanan budidaya Perikanan tangkap	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Kg Kg Ton Ton	66,458 3,161 579 14,229 3,396,602 2,074,976 5,101,703 627,905 740,461 52,675,00 763.39 3,295.10
3	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari Hulu ke Hilir	Panjang jalan Tani Pertanian yang terbangun	Meter	60,000
4	Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sub sektor pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan	Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	Paket	1
5	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian Mutakhir	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan.	Kelompok	15
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen usaha tani	Jumlah Penyuluh yang ikut pelatihan dasar dan Pelatihan tekhnis (Orang). Jumlah Kelompok yang dibina (Klp)	Orang Kelompok	70 100 klp
7	Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan	Persentase Koordinasi dan rumusan kebijakan sumber daya alam	%	100
8	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Air	Tersedianya Sumber Air Permukaan dan Air tanah dalam untuk kebutuhan pada Lahan sawah tadah hujan dan Perekebunan	Unit	34
9	Berkembang nya Produk Pertanian Organik	Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup	Kegiatan	1
10	Meningkatnya nilai produksi masingmasing sector perekonomian	Cakupan perlindungan Konsumen(Pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan Tera /Tera Ulang alat UTTP dari 6.456 menjadi 34.769 pelaku usaha)	Pelaku usaha	7.120

11	Meningkatnya sharing sector industry pengolahan jasa dalam struktur PDRB	<p>Cakupan Bina Kelompok IKM.</p> <p>Cakupan jumlah IKM Aktif dan Produktif.</p> <p>Cakupan Jumlah IKM Baru.</p> <p>Kontribusi sector Industri terhadap PDRB.</p> <p>Pertumbuhan Industri.</p> <p>Cakupan Peningkatan Kajian Pelaku Industri.</p>	<p>Kelompok</p> <p>%</p> <p>IKM</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>124</p> <p>49</p> <p>1.000</p> <p>14,75</p> <p>3,89</p> <p>72</p>
12	Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa	<p>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum.</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (LPK).</p>	<p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p>	<p>40</p> <p>9</p>
13	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit	<p>Persentase kepuasan pasien.</p> <p>Cakupan SMP Kesehatan.</p> <p>Rumah sakit lulus akreditasi.</p> <p>Persentase pasien rawat inap :</p> <p>*BOR</p> <p>*Av LOS</p> <p>*BTO</p> <p>*TOI</p> <p>*NDR</p> <p>*GDR</p> <p>Jumlah kunjungan RITL</p> <p>Jumlah kunjungan RJTL</p> <p>Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20 jam (SPM RS)</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>Terekreditasi</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Hari</p> <p>Kali</p> <p>Hari</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>pasien</p> <p>pasien</p> <p>%</p>	<p>90</p> <p>90</p> <p>Terekreditasi perdana</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>6-9</p> <p>40-50</p> <p>1-3</p> <p>15</p> <p>30</p> <p>7.743</p> <p>24.500</p> <p>60</p>
14	Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat	<p>Jumlah Kunjungan Pasien Rawat jalan.</p> <p>Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar (akreditasi puskesmas).</p>	<p>%</p> <p>puskesmas</p>	<p>80</p> <p>3</p>
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	<p>Pemantauan Status Gizi.</p> <p>Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.</p>	<p>%</p> <p>Kasus</p>	<p>100</p> <p>1</p>

16	Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan dan kesling	Persentase penduduk yang menggunakan air minum layak dan berkelanjutan.	%	100
		Persentase terjaminnya keamanan makanan.	%	100
17	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajibn belajar 12 tahun	Guru berkualifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan.	%	94,00
		Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan.	%	51
18	Berkembangnya Pendidikan Tinggi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang berkwalitas dan memadai serta kwalifikasi/kwalitas tenaga pendidik (Dosen) dan kependidikan yang berkompetensi.	%	70
19	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat	Persentase Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballigh, Tassbeh dan KIPRA.	%	100
20	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.	%	90,93
		Terlaksananya pembangunan Drainase/ Gorong- Gorong.	%	98,13
		Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur jalan.	%	31,48
		Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan.	%	16,50
		Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan.	%	35

21	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan.	Dokumen	2
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.	%	88,4
		Ratio rumah layak huni yang dibangun.	%	36,63
		Cakupan Layanan Air Minum Perdesaan.	%	82,9
		Luas Kawasan Kumuh Perkotaan.	Ha	1,96
		Meningkatnya nilai asset Pemerintah Daerah.	Lokasi	8
		Meningkatnya pengendalian pencemaran pada media air,tanah, dan udara.	Sungai/Danau	8
		Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	Unit	1
22	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah	Terpenuhi Ruang terbuka hijau yang teduh,sejuk,indah.	%	12,75
		Rasio jaringan irigasi.	%	3.4
		Jumlah Daerah Irigasi.	Jml. DI	4
		Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri.	Ha	12.867
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	%	80
Cakupan areal terdampak yang tertangani	Ha	7.000		

(Sumber Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang)

4.2.3. Profesional

Dalam hal penetapan tujuan sebuah pemerintah pasti ada namanya amanah dan pertanggung jawaban setiap organisasi. Islam menggariskan dalam firman-Nya yang artinya: *“Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan”*.

Amanah yang menjadi pembahasan pada klausa ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja *amina, ya’manu, amn (an), amanat (an), aman (an), imn (an) amanat (an)* secara *leksikal* bermakna segala yang diperintahkan Allah kepada hamba-nya.

Ibn Katsir mengemukakan bahwa ayat ini menyatakan sifat-sifat utusan tuhan, yaitu : menyampaikan seruan tuhan, memberi nasihat dan kepercayaan. Al-maraghi mengklasifikasikan amanat berbagai atas: tanggung jawab manusia kepada sesamanya, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam intraksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanah yang telah dikemukakan, yaitu amanah dari tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama dan amanah dari sesama manusia, baik itu amanah yang bersifat individual maupun organisasional. Pada konteks inilah si penerima amanah dituntut untuk profesional sesuai dengan hadist Rasulullah saw. Berikut :

“Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah kehancuran” lalu sahabat bertanya: “Ya rasulullah. Bagaimana menyia-nyiakannya ? “Rasulullah SAW, menjawab: “Jika urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya”.

Selanjutnya amanat-amanat yang dibebankan tersebut, akan dimintai pertanggungjawabannya, seperti hadist Rasulullah SAW berikut :

“setiap hamba itu adalah penggembala (pemelihara) atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta yang dikelolannya”.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyusunan perencanaan anggaran harus bersifat amanah dan bertanggung jawab hal ini ditunjukkan dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada yang terlibat atas perencanaan anggaran. Jika dalam penyusunan perencanaan anggaransudah bersikap jujurmemberi informasi dan benar sudah sesuai aturaan yang diberlakukan oleh pemerintah dan sudah di jalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisarhasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pemerintah Kabupaten SidenrengRappang telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel.4.10.IKU pemerintah kabupaten sidenreng rappang Tahun 2018

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	SUMBER DATA	FORMULASI PERHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan palawija, hortikultura dan perkebunan	<p>Produksi padi meningkat s/d 5 % pertahun.</p> <p>Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan terhadap PDRB).</p> <p>Produksi Kakao meningkat 3 % Pertahun.</p>	<p>Ton</p> <p>Ku/Ha</p> <p>Ton</p>	<p>Laporan Instansi/SKPD Terkait.</p> <p>Laporan Instansi/SKPD terkait/BPS.</p> <p>Laporan Instansi/SKPD Terkait.</p>	<p>= Jumlah peningkatan produksi padi dibanding tahun sebelumnya.</p> <p>= (PDRB sektor pertanian kab : Total PDRB kab) x 100%.</p> <p>= Jumlah peningkatan produksi kakao</p>	Dinas Pertanian dan Perkebunan

		Produksi Tanaman Palawija.	Ku/Ha	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	dibanding tahun sebelumnya. = Jumlah peningkatan produksi palawija.	
		Fasilitasi Akses Permodalan.	Klp	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	= Jumlah kelompok tani yang mendapatkan akses Permodalan.	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian.	Hand traktor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	= Persentase Jumlah kelompok tani yang mendapatkan hand traktor	
2	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Populasi Sapi	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi sapi.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi kerbau	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi kerbau	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi kuda	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi kuda.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi kambing	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi kambing.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi ayam ras pedaging pertahun	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi ayam ras pedaging / tahun.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi ayam buras Pertahun	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi ayam buras/ tahun.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi ayam ras petelur pertahun	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi ayam ras petelur.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Populasi itik	Ekor	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi itik.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
		Produksi daging sapi Pertahun	Kg	Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah populasi daging sapi/tahun.	Dinas Peternakan dan Perikanan.
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Rp	Laporan Instansi/SKPD	= (PDRB sektor peternakan kab : Total PDRB kab) x 100%.	Dinas Peternakan dan Perikanan.	

		Konsumsi daging/kapita/tahun	Kg	Terkait. Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah konsumsi daging/kapita/tahun.	Perikanan.
		Jumlah rumah potong hewan Jumlah bibit benih ikan yang berkualitas	Unit Ton	Laporan Instansi/SKPD Terkait. Laporan Instansi/SKPD Terkait.	=Jumlah rumah potong hewan. =Jumlah bibit ikan yg Berkualitas.	Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan.
3	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir	Panjang jalan tani yang terbangun	Meter	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Panjang jalan tani yang terbangun	Dinas Pertanian dan Perkebunan
4	Terciptanya keterpaduan usahatani antar sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluh perikanan	Paket	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= jumlah sarana dan prasarana penyuluh perikanan	Dinas Peternakan dan perikanan
5	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir	Pengetahuan dan keterampilan klp tani dan gapoktan meningkat	Orang	Laporan Instansi/SKPD terkait	= jumlah klp tani dan gapoktan yang terampil	Badan Penyuluhan Katahanan Pangan
6	Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani	Cakupan Pemberdayaan penyuluh	Orang	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= jumlah penyuluh pertanian yang klp tani dan gapoktan yang terampil	Badan Penyuluhan Katahanan Pangan
7	Berkembangnya Usaha Tani berorientasi pasar	Cakupan Perumusan Kebijakan	%	Laporan Instansi/SKPD terkait	= jumlah kebijakan untuk mengakses pemasaran hasil produksi pertanian	Bagian Adm. Perekonomian
8	Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian	Jumlah luasan Penanaman pohon/reboisasi pada kawasan hutan	Ha	Laporan Instansi/SKPD terkait	= jumlah luasan penanaman/ reboisasi kawasan hutan	Dinas Kehutanan, pertambangan dan energi
9	Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan tanah	Persentasi koordinasi dan perumusan kebijakan SDA	%	Laporan Instansi/SKPD terkait	= jumlah kebijakan x 100%	Bagian SDA Setda
10	Meningkatnya kelestarian sumber daya air	Jumlah sumber air permukaan dan air tanah untuk lahan	Unit	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= jumlah sumber air permukaan dan air tanah	Dinas Pertanian dan Perkebunan

		pertanian	Ha	Laporan Instansi/SKPD terkait	= jumlah luasan area pertaian yag dialiri jaringan irigasi	Dinas Pertanian dan Perkebunan
11	Berkembangnya produk pertanian organik	Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup	%	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= jumlah rumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup x 100% : jumlah produk hukum	Bagian SDA Setda
		Cakupan penggunaan pupuk organik	Ha	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= jumla luasan penggunaan pupuk organik.	Badan Penyuluhan Katananan Pangan
		Jumlah Demplot produk pertanian organik	Ha/Klp	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= jumlah demplot produk pertanian organik	Badan Penyuluhan Katananan Pangan
12	Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor pertanian	Cakupan perlindungan Konsumen	Produk	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah produk yang aman untuk dikomsumsi	Dinas Koperasi UMKM, perindustrian Dan perdagangan
		Jumlah permusuan kabijakan dan pelaporan bidang perdagangan	%	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah permusuan kabijakan dan pelaporan bidang perdagangan x 100% : kebijakan bidang perdangan di RPJMD	Dinas Koperasi UMKM, perindustrian an perdagangan
		Jumlah Peningkatan daya saing UMKM	unit usaha	Laporan Instansi/SKPD terkait	= Jumlah Peningkatan daya saing UMKM	Dinas Koperasi UMKM, perindustrian Dan perdagangan.
13	Meningkatnya shering sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur PDRB	Capaian bina kelompok Pengrajin	Klp	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah kelompok pengrajin yang sudah dibina	Dinas Koperasi UMKM, perindustrian Dan perdagangan
		Capaian peningkatan pelaku industri	%	Laporan Instansi/SKPD terkait	= Jumlah pelaku industri x 100 % : jumlah industri yg sudah ada sebelumnya	Dinas Koperasi UMKM, perindustrian Dan perdagangan
14	Meningkatnya akses pemasaran bagi produk produk UMKM	Pesentase Jumlah keluarga pra sejahtera dan pra sejahtera 1	%	Laporan Instansi/SKPD terkait	= Jumlah keluarga pra sejahtera dan pra sejahtera 1 x 100 % : jumlah keluarga	Badan KB dan Pemberdayaan perempuan
15	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan	Persentase informasi PM dan promosi	%	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah informasi PM dan promosi x 100 % : jumlah UMKM	Bagian Adm. Perekonomian

menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Persentase iklim investasi dan realisasi investasi	%	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah iklim investasi dan realisasi investasi x 100 % : jumlah investasi	kantor PTSP
	Jumlah rumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD	%	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah rumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD x 100 % : jumlah BUD	Bagian Adm. Perekonomian
	Jumlah dan Nilai PMDN serta PMA	%	Laporan Instansi/SKPD Terkait	= Jumlah nilai PMDN dan PMA x 100 % : jumlah PMDN dan PMA	kantor PTSP
	Jumlah Usaha Kecil menengah yang kondusif	%	Laporan Instansi/SKPD terkait	= Jumlah usaha kecil menengah yang kondusif x 100 % : jumlah UKM	Bagian Adm. Perekonomian

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Melihat dalam Manajemen Penyusunan Perencanaan Anggaran BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan fungsi Perencanaan (pengarah, minimalisasi ketidak pastian, minimalisasi pemborosan dan pengawasan) sehubungan dengan ini proses penyusunan perencanaan anggaran sudah sesuai dengan Manajemen yang ada. Dan penyusunan perencanaan anggarannya pun sudah tepat waktu dan memenuhi aturan yang berlaku yang di tentukan dari pemerinrah Pusat. yakni sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya.
- 5.1.2. Dalam Penyusunan perencanaan anggaran pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan Manajemen Syariah. Karena sudah menerapkan prinsip keadilan dan kepatuhan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Analisis Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah), maka saran yang yang dapat penulis kemukakan yaitu :

- 5.2.1. Kepada Pegawai yang terlibat langsung dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga bisa

meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum Dan lebih mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepatutan dan keadilan agar sesuai dengan Manajemen Syariah.

- 5.2.2. Diharapkan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan anggaran yang dikaitkan dengan visi misi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 5.2.3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih dalam dan menindaklanjuti hasil penelitian ini khususnya mengenai kajian anggaran, output dan outcome dari anggaran yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Agustinus Sri Wahyuni. 2010. *pengantar proses berfikir strategi manajemen strategi*, Jakarta, Binarupa Aksara.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2006. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.

Amin Fadillah. 2019. *penganggaran di pemerintah daerah dalam perspektif teoritis, normatif, dan empiris*. Malang: UB Press.

Arep Ishak dan Hendri Tanjung, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: penerbit Universitas Trisakti.

Barata, 2004, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi PPs UG.

Bugin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Akuntansi Metodologis Kearah, Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali.

Damayanti, Halim, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Seri Bunga Rampai.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*.

Didin & Hendri, 2003, *Manajemen Syaria'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

Hafidhuddin Dr. K.H. Didin, M.Sc, Hendri Tanjung, S.Si., M.M. 2003. *Manajemen Syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Halim Abdul, Theresia Damayanti. 2007. *pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: Seri Bunga Rampai, UPP STIM YKPN.

Haryanto, SE, M.Si, Ak, 2008, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah pendekatan kinerja*, Semarang.

Husain, Usman. 2008. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Karianga Dr. Hendr, S.H, M.H., 2017, *Carut Marut Pengelolaan Keangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Depok : Kencana.

Khatthab Mahmud Syeit, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

- Lexy Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M.L. Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad.2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mulyani Sri, 2016, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah*, Bandung : Abdi Sistematika.
- Nurkholis,Moh. Khusaini. 2008. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- P. Sondang, Siagian MPA. 2005. *Fungsi-Fungsi Majerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- S.P. Malayu, Hasibuan. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sifuddin Azwar. 2000. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stevi jimri Poluan, ST.MM.,Sahala Manalu, S.E., M.M., 2018, *Cara Akurat Menyusun Penganggaran Perusahaan Manufaktur*, Malang.
- Sugiono. 2010.*metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule Tisnawati Erni, Kurniawan Saefuddin. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suwandian Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tilaar. Dkk. 2011. *Pedagogik Kritis. Perkembangan, substansi dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusunan pedoman penulisan karya ilmiah Makalah dan skripsi, Edisi Revisi Pare-pare IAIN Pare-pare,2013.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Refrensi Jurnal

Kaumbang Judisty. 2014. *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran*. Manado: Jurusan Ekonomi dan Bisnis.

Nur Amalia Fitra, 2014. *Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Nurbaya. 2018. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng : Program Studi Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Refrensi Internet

<http://26-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-dan-proses.html>.

<http://dedetzlth.blogspot.com/2013/02/pengertian-tujuan-dan-fungsi-perencanaan.html?m=1>

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/penganggaran-definisi-fungsi-manfaat.html>



RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Widya Dharma Wuarlela lahir di Parepare, pada tanggal 06 Agustus 1997 di RS. Fatimah kota Parepare. Penulis anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Yesaya Wuarlela dengan Rosmawati. Pendidikan Formal penulis menamatkan Sekolah Dasar pada SD Negeri 57 Parepare Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan lulus Tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan studi ke SMP Negeri 5 Parepare Kecamatan Bacukiki Barat dan lulus tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 3 Parepare Kecamatan Ujung Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015. Pada Tahun yang sama penulis lalu melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata satu (S1) dengan mengambil jurusan FEBI, Program Studi Ekonomi Syariah.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang dan melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lasiwala Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis mengajukan Skripsi dengan judul **“Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah)”**.